e-ISSN: 2620-3332 SELODANG MAYANG

MODEL PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MERANTI

Irwan Nasir[1], Agus Maulana[2]
[1]Universitas Riau, Pekanbaru
[2]Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan

Email: agusmaulanaunisi@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The purpose of this study is to find out more about the allocation of village fund management by village/sub organizations that are directly involved in the aspects of Strategic Leadership and Officer Commitment in carrying out distribution and implementation according to the Musrenbangdes and see government policy gaps in flexibility and maximizing the use and management of village fund allocations to encourage the creation of Budget performance in development and priorities according to the agreement with the community according to the vision, mission and objectives of village development in the Meranti Islands Regency with a quantitative method as many as 309 respondents. The results of the study show that there is still a need for Knowledge Management for organizational members, Agile Management in dealing with environmental changes and the urgency of the current situation, as well as increasing knowledge in budget implementation regulations and skills for members to motivate stakeholders the Village Fund allocation budget in increasing the budget in the coming year.

Keywords: *Strategic Leadership, Officer Commitment, Government Policy, Budget Performance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam alokasi pengelolaan dana desa oleh organisasi desa/kelurahan yang terlibat langsung dalam aspek Kepemimpinan Strategis dan Komitment Petugas dalam melaksanakan pendistribusi dan pelaksanaan sesuai Musrenbangdes dan melihat celah Kebijakan Pemerintah dalam flexibility dan maksimalisasi penggunaan dan pengelolaan alokasi dana desa mendorong terciptanya Kinerja Anggaran dalam pembangunan dan prioritas sesuai kesepakatan dengan masyarakat sesuaikan dengan visi misi dan tujuan pembangunan desa di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan metode kuantitatif sebanyak responden 309 peserta. Hasil penelitian menunjukan masih perlunya Knowledge Mangement bagi anggota organisasi, Management Agile dalam menghadapi perubahan lingkungan dan urgensi keadaan saat ini, serta peningkatan pengetahuan dalam peraturan pelaksanaan anggaran dan ketrampilan bagi anggota untuk memotivasi stakeholder anggaran alokasi Dana Desa dalam peningkatan anggaran pada tahun mendatang.

Kata kunci: *Kepemimpinan Strategi, Komitmen Petugas, Kebijakan Pemerintah, Kinerja Anggaran.*

1. PENDAHULUAN

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Dr. Budiarso Teguh Widodo Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kebijakan Fiskal dalam Ranga Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Murenbang RKPD Provinsi Jawa Timur (2018), Strategi dan Kebijakan Fiskal (4) Pokok-pokok Kebijakan Dana Perimbangan, Pengalokasian dan pengaturan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mendorong penggunaan belanja Daerah secara efektif dan efisien, berlandaskan value for money, serta sinergi antara belanja pusat dan daerah. DAU: Menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan Celah Fiskal. Mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan (bobot luas wilayah laut menjadi 100%). Pagu DAU tidak bersifat final (berbasis realisasi PDN). Minimal 25% dari DTU untuk belanja infrastruktur layanan publik dan ekonomi.

DBH: Komitmen penyelesaian kurang bayar dan lebih bayar DBH. Pengaturan minimal 50% dari alokasi DBH CHT untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; Pengaturan penggunaan sisa DBH DR di kab/kota dan alokasi DBH DR provinsi dengan prioritas untuk: 1. penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; 2. mengatasi dampak climate change; 3. mendukung program perhutanan sosial; serta 4. rehabilitasi hutan dan lahan; Penggunaan minimal 25% dari DBH untuk belanja infrastruktur yang produktif. DAK FISIK: Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL.

a. Pengintegrasian aplikasi perencanaan DAK Fisik kedalam aplikasi KRISNA (Kolabrasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran);
b. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (Proposal Based); • Mempertajam menu kegiatan DAK Fisik untuk mendukung pencapaian prioritas nasional;
c. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic approach), contoh penanggulangan stunting.
d. Penambahan menu kegiatan DAK baru yaitu GOR dan Perpusda.

DAK NON FISIK: Fokus pada upaya perbaikan kualitas kinerja untuk seluruh bidang DAK Non Fisik, melalui: 1. Pengalokasian berbasis kinerja 2. Penyaluran berbasis kinerja dan peningkatan efektivitas pemantauan. Pengalokasian sesuai kebutuhan riil di daerah, dalam rangka pencapaian SPM. Integrasi program based DAK untuk Stunting. Penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan unit cost. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan output dan efisiensi biaya layanan. Mengakomodasi jenis DAK Nonfisik baru (saat ini dalam proses pembahasan): 1. PLTsa; 2. BOP Museum dan Taman Budaya; dan 3. Dana Pelayanan Kepariwisataan. 4. BOP Kesetaraan

Strategi dan Kebijakan Fiskal (8): Kebijakan Dana Desa Tahun 2019 adalah:

a. Meningkatkan besaran Dana Desa untuk percepatan penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.
b. Menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan pemerataan dan berkeadilan, serta fokus pada upaya: a. Mendukung upaya pencapaian sasaran nasional pembangunan desa; b. Mempercepat pengentasan kemiskinan; c. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik di desa; dan d. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
c. Memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu: a. Bidang pembangunan desa, untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, dan kepala keluarga yang memiliki balita atau bayi stunting dan mengentaskan kemiskinan melalui skema padat karya tunai. b. Bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan potensi ekonomi lokal desa melalui kegiatan ekonomi kreatif desa dan pemberdayaan BUM Desa, serta mengembangkan potensi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
d. Kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output.
e. Meningkakan upaya pemerintah dalam Perencanaan Partisipatif desa dan Swakelola desa. 6. Memperkuat supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan Dana Desa.
f. Meningkatkan kesiapan kelembagaan pengelola Dana Desa, kapasitas perangkat desa, serta tenaga pendamping.

Penelitian ini bertujuan menemukan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang didorong oleh faktor Komitmen Petugas Anggaran dan Kebijakan Pemerintah serta factor Utama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa yakni Kepemimpinan Strategis seorang Kepala Desa selaku penanggungjawabnya.

2. LITERATUR REVIEW

Anggaran Kinerja, Adam Hayes, (2020) Apakah Anggaran Kinerja itu? Anggaran kinerja adalah anggaran yang mencerminkan input sumber daya dan output layanan untuk

setiap unit organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menilai kinerja relatif berdasarkan pencapaian tujuan untuk hasil tertentu. Jenis anggaran ini biasanya digunakan oleh badan dan lembaga pemerintah untuk menunjukkan hubungan antara dana pembayar pajak dan hasil layanan yang diberikan oleh pemerintah federal, negara bagian, atau lokal.

Memahami Anggaran Kinerja, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), (2021), Peningkatan quality control anggaran TKDD dan mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Arah Kebijakan TKDD: Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui: a. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi. b. Dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM. Mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan human capital (Pendidikan dan Kesehatan). Mendorong belanja Infrastruktur daerah melalui creative financing seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerjasama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN. Redesain pengelolaan TKDD, terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).

Proses keputusan untuk anggaran performa berfokus pada keluaran—atau hasil—layanan. Dengan kata lain, alokasi dana dan sumber daya didasarkan pada tujuan khusus yang disepakati oleh komite anggaran dan kepala dinas. Misalnya, di sekolah, guru dapat memperoleh bonus atau promosi berdasarkan nilai tes agregat di antara siswa mereka, yang seharusnya menunjukkan tingkat keterampilan dan efektivitas yang tinggi (walaupun hal ini mungkin tidak selalu terjadi) Anggaran kinerja, sebagai teori pergi, dirancang untuk memotivasi karyawan, meningkatkan komitmen mereka untuk menghasilkan hasil yang positif.

Beberapa contoh hasil yang dapat ditangani oleh anggaran kinerja meliputi: Peningkatan nilai ujian rata-rata di distrik sekolah, Penurunan angka kematian atau kesakitan suatu program kesehatan, Peningkatan kualitas air dari pasokan air minum kabupaten, Pengurangan kejahatan tanpa kekerasan di kota, Berkurangnya keluhan jalan berlubang

Semua ini akan memiliki target numerik yang melekat pada mereka. Anggaran kinerja akan dikembangkan sesuai untuk mengidentifikasi angka-angka target tersebut dan metode evaluasi kinerja. Anggaran kinerja sering kali bergantung pada kuantifikasi faktor kualitatif atau subjektif sehingga dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Pengambilan Kunci: Anggaran kinerja mencerminkan input sumber daya dan output layanan untuk setiap departemen atau unit organisasi. Mereka dirancang untuk memotivasi komitmen karyawan untuk menghasilkan hasil yang positif. Kerugiannya termasuk potensi ketidaksepakatan mengenai prioritas pengeluaran dan kurangnya standar biaya terpadu.

Beberapa aspek yang mempengaruhi Kinerja Anggaran Alokasi Dana Desa:

a. Leadership Strategi (LS) artinya Strategi Kepemimpinan dalam pelaksanaan strategi pengelolaan dana berdasarkan peraturan pemerintah pusat terdapat DAU Minimal 25% dari DTU untuk belanja infrastruktur layanan publik dan ekonomi. DBH: Komitmen penyelesaian kurang bayar dan lebih bayar DBH. Pengaturan minimal 50% dari alokasi DBH CHT untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan. Penggunaan minimal 25% dari DBH untuk belanja infrastruktur yang produktif.
b. Employee Commitmen (EC) artinya komitment petugas pengelolan yang terdiri dari minimal tiga orang yang pelaksana utama dan yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah Kepala Desa sekaligus sebagai Pimpinan dan Sekretaris Desa serta Bendahara sebagai anggota organisasi.
c. Governance Policy (GP) artinya Kebijakan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan peraturan pemerintah dan SK Kementrian Keuangan terdapat posentase celah kebijakan dalam penggunaan dan alokasi anggaran pada nilai ambang batas anggaran minimum dan maksimum.
d. Budget Performance (BP) artinya dalam meningkatkan kinerja petuga dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam mengikuti acuan-acuan yang

sudah disusun dalam pokok-pokok kebijakan dana perimbangan

3. METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif deskripsi penjelasan dari wawancara menggunakan sampel adalah kepala desa anggota pengelola alokasi dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 103 Desa/Kelurahan BPS (2019) dengan asumsi petugas pengelola Alokasi Dana Desa adalah tiga orang per Desa/Kelurahan yakni Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara.Total Responden 309 orang.

4. KERANGKA PEMIKIRAN

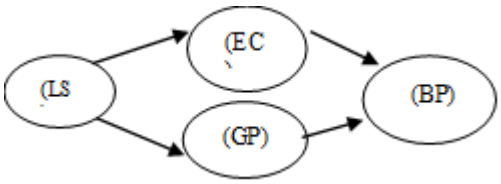

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Aspek Strategis Model Kepemimpinan Kepala Desa (LS) Dalam Meningkatkan Kinerja Alokasi Dana Desa (BP) dengan Komitment Petugas (EC) dan Kebijakan Pemerintah (GP) sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

5. HASIL PENELITIAN.

Berdasarkan hasil wawancara survey dilapangan pada metode penelitian secara kualitatif ketika Rapat Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Murenbang Kabupaten pada Laporan Pencapaian dihasil Alokasi Dana Desa dibagi dalam 3 kelompok kriteria secara umum berdasarkan hasil penelitian yang lebih dalam yaitu berdasarkan pada kelompok pulau yang ada banyak desa disitu.

a. Pulau-pulau yang terletak pada titik rentang kendali lebih jauh dari ibukota Kabupaten dengan kesulitan menjangkau menggunakan kendaraan darat, laut dan sungai, terdapat karakteristik pengelolaan dan motivasi dalam kebijakan anggaran desa dengan pokok-pokok kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa 40% lebih kurang efektif karena terserap biaya transportasi dan pengangkutan dari 100% kinerja anggaran namun demikian peningkatan pengelolaan dan penggunaan optimalisasi kinerja anggaran mampu mencapai 60% dalam setiap tahun pada lima tahun jabatan masa periode kepemimpinan dapat digambarkan desa-desa yang terletak pada Kepulauan Tebing Tinggi Timur, Merbau dan Rangsang.
b. Pulau-pulau yang terletak pada titik rentang kendali lebih dekat dari ibukota Kabupaten dengan terjangkaunya kendaraan melaui jalan darat dan kendaraan sungai yang tidak begitu lama kurang dari satu atau dua jam seperti Pulau Merbau, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi dan Rangsang Barat dengan pokok-pokok kebijakan penggunaan dan pengelolaan optimalisasi kinerj anggaran mampu mencapai 80-90 % efektifitas kinerja anggaran dengan penghematan biaya transportasi dan angkutan bahan baku pembangunan fisik dan non fisik hanya penyerapan 10-20 % dari kinerja anggaran dan jauh lebih efisien.
c. Hal ini dapat membedakan asumsi Strategi Kepemimpinan dalam mendongkrak dan memotivasi peningkatan daya serap Alokasi Dana Desa akan berbeda secara nasional karena letak dan bentuk negara NKRI yang kepualauan serta dipisahkan oleh selat dan laut serta melalui beberapa karakter pantai yang berlumpur serta berpasir, sebagai tantangan dalam optimalisasi serta penambahan biaya.

6. DISKUSI.

Pelaksanaan pengelolaan dan alokasi Dana Desa merupakan wujud nyata Pembangunan dari Kebijakan Fiskal yang diatur dalam Peraturan dan Keputusan Perangkat Pemerintah Pusat untuk dipatuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai Bukti Peimbangan Pendistribusian Dana Pembangunan Nasional sehingga diatur dalam Pokok-pokok Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa agar Strategi Kepemimpinan (LS) dalam menjalankan Tugas dan Tanggungjawab sebagai Kepala pemerintahan terkecil di tingkat Desa/Kelurahan sekaligus sebagai anggota pelaksana kegiatan memiliki kewenangan kebijakan dalam melihat, memotivasi dan mengevaluasi Komitmen Anggota (EC) Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan melihat celah kebijakan pemerintah (GP) dalam posentase alokasi Dana Desa pada keadaan situasi yang dibutuhkan sesuai aturan sehingga bagaimana pemimpin dengan strategi kepemimpinnya terhadap capaian Kinerja Alokasi Dana Desa (BP) dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak

melakukan pengembalian sisa dana kas. Dukungan pendapat Adam Hayes (2020) tentang pembangunan alokasi dana pedesaan secara fisik dan non fisik mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

a. Kemampuan dan strategi kepemimpinan kepala desa (LS) dalam pengetahuan dan informasi dalam penggunaan alokasi dana desa adalah sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan meletakan kegunaan dan tujuan anggaran sehingga memiliki kesamaan visi dan misi bersama anggota pengelola dan pengguna alokasi Dana Desa dan masyarakat berdasarkan hasil musyawarak rencana pembangunan desa.
b. Komitmen Anggota (EC) pengelola alokasi Dana desa merupakan ujung tombak dalam realisasi gerak kegiatan dan pembangunan serta pendistribusian alokasi dana desa sehingga kemampuan administrai dan ketrampilan yang mendukung serta kesamaan tujuan terhadap komitmen program dan kepatuhan perintah pimpinan menjadi kunci terwujudnya komitmen anggota dalam pelaksanaan alokasi dana desa.
c. Kebijakan Pemerintah (GP) masih memberikan celah toleransi anggaran dalam aturan dan prosentasi yang ditetapkan dalam pokok-pokok kebijakan sehingga tidak salah memanfaatkan bagi anggota pelaksana pengelola alokasi dana desa.
d. Kinerja Alokasi Dana Desa (BP) merupakan wajah dari setiap desa dalam pencapaian kinerja maksimal penggunaan dan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa

7.2. Saran.

a. Kepemimpinan Strategis (LS), kepala desa merupakan tokoh pemegang peran penting dalam semua bidang khususnya Alokasi Dana Desa sehigga dalam meningkatkan dan memotivasi masyarakat dan anggota pelaksana kegiatan perlu melihat dan memilih prioritas kegiatan serta urgensi, dituntut kemampuan dan ketrampilan Manajemen Agile dalam kebijakan penggunaan anggaran serta Knowledege Management dalam pengelolaan organisasinya.
b. Pencapaian dan Peningkatan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya menjadi catatan penting bagi setiap Desa sehingga yang bertanggungjawab secara agregat dan prinsipnya adalah melibatkan semua perangkat desa dan masyarakat sesuai dengan kesepakatan dalam Musrendes sebagai Engagment dalam pekerjaan alokasi Dana Desa.

Daftar Pustaka

[1]. Budget Performance, (2020) https://www.investopedia.com/terms/p/performance-budget.asp

[2]. BPS (2019), Data Desa dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Meranti, https://merantikab.bps.go.id/indicator/101/192/1/jumlah-desa-kelurahan-di-kabupaten-kepulauan-meranti.html

[3]. Employees Commitment, (2019) https://www.effectory.com/knowledge/what-is-employee-commitment/

[4]. (4). Engagment, Dr Richard McBain, (2007),"The practice of engagement: Research into current employee engagement practice", Strategic HR Review, Vol. 6 Iss 6 pp. 16-19, Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/14754390780001011.

[5]. Knowledge Management, (2019) https://www.linovhr.com/knowledge-management/

[6]. Kementrian Keuangan RI, Budiarso Teguh Widodo, (2018), http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wpcontent/uploads/2018/04/paparan_kemenkeu.pdf

[7]. Kebijakan Pemerintah, (2020) Peningkatan Alokasi Dana Desa, http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa 2021.pdf

[8]. Kebijakan TKDD, (2021), Capaian dan Tantangan Pembangunan Desa, http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf.

[9]. Machasin, (2021), Leadership Teori, Model dan Skema, bedah buku seminar, WEBINER Leadership Revolution, Tifa Consulting, Pekanbaru, 6 Juni 2021, https://us02web.zoom.us/j/88418376

667?pwd=clNkS1kveDNyV2VSSHVFNDRsd2k0QT09
[10]. Management Agile, (2019) https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/performance-management-in-agile-organizations#.